

PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI E-GOVERNMENT SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI PEMERINTAHAN KEPADA MASYARAKAT (Studi Kasus Website E-Government DPRD di Kabupaten Paser Kalimantan Timur)

Zulfani Ilyasha Anwar¹, Mohammad Taufik²,

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Vol. 13, No. 02

Page : 39-50

Published : 2025

KEYWORDS

Komunikasi Pemerintahan,
Partisipasi Masyarakat.

CORRESPONDENCE

A B S T R A C T

Penelitian ini mengkaji penerapan teknologi informasi e-government sebagai media komunikasi pemerintah melalui situs web e-Government DPRD di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana platform ini mendukung efisiensi dan efektivitas komunikasi pemerintah dengan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi yang melibatkan informan kunci, termasuk ketua DPRD, pengelola situs web, staf terkait, dan anggota masyarakat yang mengenal atau terlibat dalam penggunaan situs web DPRD.

Temuan menunjukkan bahwa implementasi e-government melalui situs web DPRD belum sepenuhnya mencapai tujuannya. Beberapa tantangan masih ada, terutama di bidang sosialisasi, mekanisme alur kerja, dan partisipasi masyarakat. Kurangnya sosialisasi langsung kepada masyarakat telah membatasi kesadaran dan pemanfaatan situs web oleh masyarakat. Selain itu, pengelolaan dan koordinasi situs web masih terfragmentasi, yang menyebabkan fungsionalitas yang tidak lengkap dan pemberian layanan yang kurang optimal. Kesimpulannya, meskipun situs web DPRD merupakan langkah penting menuju tata kelola digital, efektivitasnya sebagai media komunikasi masih terkendala oleh keterbatasan jangkauan dan masalah manajemen teknis. Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dan peningkatan keterlibatan publik diperlukan untuk meningkatkan keberhasilan implementasi e-government di Kabupaten Paser.

INTRODUCTION

Dalam perkembangan teknologi hingga saat ini khususnya teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari berkembang sangat pesat sehingga dimanfaatkan dengan baik dalam komunikasi mencari informasi maupun menerima informasi sehingga memudahkan penggunaannya mendapat informasi yang diinginkan dengan mudah karena dapat di akses

dimana saja dan kapan saja. Teknologi informasi ini juga bermanfaat bagi pemerintah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang kemudian dimanfaatkan pemerintah dengan menetapkan program pembangunan dan pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) atau yang biasa disebut dengan e-Government.

Sistem e-Government adalah sebuah

sistem yang didefinisikan secara umum sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di sektor publik untuk meningkatkan kualitas operasi dan memberikan layanan. Oleh sebab itu, pengertian utama dari e-Government ada dua, yaitu pertama tentang penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu dan yang kedua tujuan dari pemanfaatannya yang lebih efisien dalam membantu sistem pemerintahan.

Berkembangnya pemanfaatan sistem teknologi ini dapat mengurangi human error dan meningkatkan efektifitas kerja Pemanfaatan teknologi informasi ini juga diatur dalam undang-undang sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government yang mengacu pada penyelenggaraan pemerintahan secara elektronis di Indonesia yang berarti merupakan sebuah instruksi untuk menggunakan e-Government dalam tata kelola pemerintah dari segi pelayanan, komunikasi, dan lain-lain. Pemanfaatan e-Government ini dapat mengurangi biaya administrasi sambil meningkatkan pengawasan dan standar pelayanan publik. Hal ini mendorong lembaga negara di Indonesia untuk menggunakan website tersebut sebagai media informasi, komunikasi hingga pelayanan kepada publik.

Saat ini, instansi pemerintah telah memanfaatkan teknologi melalui jaringan komunikasi dan informasi dengan cara menghadirkan e-government yang bisa dijadikan media untuk berkomunikasi kepada masyarakat dan juga menjadikan website tersebut sebagai tempat untuk menyimpan dan mencadangkan arsip-arsip serta dokumentasi dari seluruh kegiatan pemerintahan. Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Kementerian Teknologi dan Informasi menyatakan bahwa sebagian besar situs pemerintah daerah otonom berada di tingkat pertama yaitu persiapan, dan hanya sedikit yang telah berada di tingkat dua (pematangan). Hal tersebut menjadi acuan dalam penerapan e-government yang

seharusnya dilakukan pemerintah khususnya DPRD Kabupaten Paser dalam berkomunikasi kepada masyarakat.

Menurut Wahyudi Kumoroto (2009:7), setidaknya ada tiga faktor yang menjadi penentu dalam keberhasilan dan kegagalan e-Government, yaitu:

- 1) Infrastruktur
Menyangkut pada ketersediaan teknologi yang mendukung penerapan e-Government.
- 2) Kepemimpinan
Komitmen dan dukungan dari pimpinan organisasi hingga pimpinan daerah dalam menerapkan e-Government.
- 3) Budaya
Budaya yang dimiliki masyarakat yang kurang peduli dan mendukung pemerintah dalam menerapkan dan pemanfaatan e-Government.

Sehubungan dengan e-Government, media website menjadi salah satu media online yang dapat digunakan untuk mempermudah penyebaran informasi oleh pemerintah dan masyarakat dalam menggali informasi. Selain itu, website juga merupakan sebuah situs yang harus sering di perbaharui dan informasi terkait pembaharuan juga harus dimuat pada halaman utama dalam website sehingga setiap operator atau admin dari e-Government benar-benar menggunakan situs website pemerintahan untuk mengejar berita dan informasi terkini untuk dimuat dalam halaman website untuk dijadikan sebuah informasi kepada publik sehingga situs website pemerintah tersebut berjalan sesuai dengan fungsinya dan sudah sesuai dengan keinginan.

Pada saat ini, DPRD Kabupaten Paser telah menerapkan sistem e-Government dalam tata kelola pemerintahannya. Dengan menerapkan sistem e-Government ini tentu saja diharapkan dapat menjadi dialog publik serta media untuk menyerap aspirasi masyarakat dan meningkatkan kinerja dari DPRD itu sendiri dalam hubungan komunikasi baik komunikasi

internal maupun eksternal. Dengan hadirnya teknologi informasi yang memudahkan komunikasi tentu saja dimanfaatkan DPRD Kabupaten Paser untuk menyerap aspirasi masyarakat dan juga memberikan informasi terkait pemberitahuan dan pengumuman yang berguna bagi masyarakat.

Website yang diadirkan DPRD Kabupaten Paser ini bentuk dari pemanfaatan teknologi informasi dengan bentuk komunikasi satu arah. Bentuk interaksi komunikasi dalam website tersebut hanya memberikan informasi tanpa adanya interaksi balik dari pengunjung. Dalam website ini tidak termuat kolom komentar untuk pengunjung melakukan interaksi dengan pihak DPRD. Pengunjung hanya dapat mengakses untuk melihat kabar, berita dan informasi terbaru tanpa adanya interaksi balik yang perlu sebagai bentuk tanggapan kritik, dan saran dalam sebuah bentuk komunikasi.

Didalam website DPRD Kabupaten Paser (<https://dprd.paserkab.go.id/>) yang digunakan sebagai media komunikasi kepada masyarakat memiliki data kunjungan website yang selalu diperbaharui setiap harinya. Website ini memiliki data kunjungan (2023) perharinya seperti visit today ± 50 pengunjung, Visits 28.137 pages today ± 50 , pages 56.448 dan dari data tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa ada penurunan ataupun kenaikan di setiap harinya.

Adanya data kunjungan ini, dapat menjadi gambaran sederhana bagaimana penerapan media website DPRD Kabupaten Paser berjalan dari segi partisipasi masyarakat. Untuk mengetahui keseluruhan penerapan media website DPRD Kabupaten Paser diperlukan pengumpulan data mendalam dengan informan yang terkait langsung dengan media website tersebut.

THEORETICAL FRAMEWORK

Teknologi informasi dan komunikasi tentunya berperan penting dalam kehidupan

sehari-hari seperti dalam hal telekomunikasi. Dengan kemajuan teknologi informasi pada saat ini akan sangat memudahkan untuk mendapatkan informasi meski sejauh apapun jaraknya. Saat ini semua kalangan masyarakat akan sangat mudah mendapatkan informasi dengan bantuan dari alat-alat teknologi informasi yang ada pada saat ini sebagai media komunikasi. Menurut Meyrs & Meyrs, komunikasi memiliki definisi sebagai titik pusat kekuatan dalam menyatukan sehingga terbentuk dan terjadi koordinasi antara orang-orang dan sebab itu mereka akan bergerak berdasarkan suatu tindakan yang terorganisir.

Pada dasarnya komunikasi pemerintahan adalah penyampaian ide, gagasan, informasi, dan isi pikiran dari pemerintah kepada masyarakat untuk mencapai tujuan negara. Dalam hal ini pemerintah dapat dikatakan berperan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai penerima pesannya, namun dalam kondisi tertentu peran ini bisa sebaliknya dengan masyarakat sebagai komunikator dan pemerintah sebagai penerima. Teknologi informasi ini juga bermanfaat bagi pemerintah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang kemudian dimanfaatkan pemerintah dengan menetapkan program pembangunan dan pengembangan TIK atau yang biasa disebut dengan *e-Government*.

Penerapan teknologi informasi dalam *e-government* merupakan tindakan yang didasari oleh Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional tentang pengembangan *e-government*. *e-Government* berbicara tentang penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu dan tujuan dari pemanfaatannya yang lebih efisien dalam membantu sistem pemerintahan. Dalam penerapannya, *e-Government* dijadikan alat atau media yang digunakan pemerintah untuk mempermudah segala kegiatan yang bisa dicangkup oleh teknologi agar lebih efisien. Saat ini, instansi pemerintah telah memanfaatkan teknologi

melalui jaringan komunikasi dan informasi dengan cara menghadirkan *e-government* yang bisa dijadikan media untuk berkomunikasi kepada masyarakat dan juga menjadikan website tersebut sebagai tempat untuk menyimpan dan mencadangkan arsip-arsip serta dokumentasi dari seluruh kegiatan pemerintahan.

e-Government pada saat ini perlu untuk dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dengan cara meningkatkan efisiensi, layanan-layanan baru, menjadi ruang diskusi yang meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan kualitas dalam pelayanan informasi menuju *good government*. Selain itu, penerapan *e-government* di Indonesia terjadi karena adanya tuntutan dari masyarakat yang berbeda namun memiliki kaitan yang erat, yaitu:

- a. Tuntutan pelayanan publik yang meliputi kepentingan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia yang dapat diandalkan dan terpercaya serta mudah dijangkau secara interaktif
- b. Masyarakat yang ingin aspirasi mereka didengar, sehingga pemerintah wajib memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam merumuskan kebijakan negara yang melibatkan masyarakat luas (transparan).

Hal tersebut menjadi acuan dalam penerapan *e-government* yang seharusnya dilakukan pemerintah khususnya DPRD Kabupaten Paser dalam berkomunikasi kepada masyarakat. Penelitian ini berfokus pada penerapan *e-government* pada media *website* DPRD Paser yang digunakan sebagai media komunikasi pemerintahan kepada masyarakat serta bagaimana pengelolaan dari *website* tersebut dari segi penerapan, komitmen pemerintah, serta perilaku masyarakat.

Dengan menerapkan sistem *e-Government* ini tentu saja diharapkan dapat menjadi dialog publik serta media untuk menyerap aspirasi

masyarakat dan meningkatkan kinerja dari DPRD itu sendiri dalam hubungan komunikasi baik komunikasi internal maupun eksternal. Dengan hadirnya teknologi informasi yang memudahkan komunikasi tentu saja dimanfaatkan DPRD Kabupaten Paser untuk menyerap aspirasi masyarakat dan juga memberikan informasi terkait pemberitahuan dan pengumuman yang berguna bagi masyarakat. Oleh sebab itu, DPRD Kabupaten Paser memanfaatkan teknologi informasi *e-Government* ini dengan bentuk media *website* dengan tujuan sebagai alat atau media dalam berkomunikasi kepada masyarakat yang dapat dengan mudah diakses kapanpun dan dimanapun.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi dan dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai macam metode alamiah. Metode ini diterapkan untuk melihat serta memahami subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta (Gunawan, 2014: 81). Pemahaman ini tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi di dapat setelah melalui tahap analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman baru yang bersifat umum tentang kenyataan-kenyataan. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan lebih dalam mengenai fakta, keadaan dan fenomena objek alamiah yang menekankan pada makna pada saat penelitian berjalan (Anggito & Setiawan, 2018).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi. Informan penelitian adalah

ketua DPRD Kabupaten Paser, operator/admin pengelola website, pegawai yang terkait, dan Masyarakat yang mengetahui dan terlibat dalam penerapan e-Government pada media website di Kabupaten Paser. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif menurut Creswell, 2014. Penerapan proses coding dalam mengolah informasi yang berasal dari hasil wawancara atau materi penelitian berdasarkan literatur menjadi bagian-bagian tulisan sebelum memaknainya yang berhubungan dengan media website, mendeskripsikan kegiatan dan tema, menyajikan kembali deskripsi dan tema-tema yang telah dibuat, serta penarikan kesimpulan.

RESULT AND DISCUSSION

Coding dan Tema

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti di lapangan, dalam langkah ini melibatkan beberapa tahapan yang berupa pengambilan data tulisan yang telah dikumpulkan selama proses wawancara yang berhubungan dengan literatur, mendeskripsikan kegiatan dan tema, menyajikan kembali deskripsi dan tema-tema yang telah dibuat, serta membuat kesimpulan. Data informasi yang digunakan oleh peneliti berdasarkan pada hasil wawancara langsung dengan beberapa informan dan kuesioner masyarakat tentang website.

Berikut dihasilkan, tabel 1. Coding dan Tema.

Tabel 1. Coding dan Tema

<i>Coding</i>	Tema
---------------	------

<i>e-Government</i> : pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan pemerintah untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara efisien. Terdapat 3 faktor yang menentukan dalam keberhasilan dan kegagalan dalam penerapan e-Government. 1. Kepemimpinan a) Pihak DPRD melakukan sosialisasi sebagai komitmen untuk mengenalkan website dan sosial media mereka kepada masyarakat. 2. Infrastruktur a) Ketersediaan media pendukung penerapan website dari segi <i>hardware</i> dan <i>software</i> (Computer, internet, server, website PETA BAPADAH, JDIH, Facebook, instagram dan lain-lain). b) Mempromosikan atau memperkenalkan anggota dewan kepada masyarakat. c) Kegiatan rapat anggota berupa produk jadi seperti perda. d) Penyampaian kegiatan kerja anggota, RDP, Pembahasan dan kunjungan seperti studi banding keluar. e) Informasi yang dipublikasikan bersifat <i>up to date</i>.	1. Penerapan e-Government a) Sosialisasi sebagai Bentuk Komitmen Penerapan Media Website DPRD b) Mekanisme Alur Kerja dan Infrastruktur Penerapan Media Website DPRD
3. Budaya a) Kecenderungan masyarakat sebagai pengunjung website dan penerima informasi.	2. Perilaku Masyarakat Sebagai Pihak Penerima Informasi Website DPRD

Penerapan e-Government

Bentuk penerapan yang dilakukan sebagai pendorong pelaksanaan kegiatan e-government sebagai media informasi dan komunikasi kepada masyarakat pada website DPRD Kabupaten Paser yang menjadi fokus penelitian diantaranya sosialisasi DPRD dalam

mengenalkan media website serta pelaksanaan mekanisme alur kerja dan infrastruktur pendukung pengelolaan media website. Penerapan e-Government berbentuk website yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Paser tentu saja harus memiliki komitmen dalam pelaksanaannya agar terus berjalan dan dikelola dengan baik. Kedua hal ini merupakan bentuk penerapan e-government pada media website yang penting dilakukan agar pengelolaan media website dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berikut point penjelasan kedua bentuk penerapan oleh DPRD Kabupaten Paser.

a.) Sosialisasi Sebagai Bentuk Komitmen Penerapan Media Website DPRD

Penerapan e-Government berbentuk website yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Paser tentu saja harus memiliki komitmen dalam pelaksanaannya agar terus berjalan sehingga dapat dikelola dengan baik. Komitmen sendiri adalah sebuah kesediaan atau keterikatan untuk melakukan atau menjalankan sesuatu. Sedangkan sosialisasi merupakan bentuk komitmen yang dilakukan oleh pemerintah terutama dalam penelitian ini adalah DPRD selaku pengelola website.

Sosialisasi penting untuk dilakukan sebagai pengenalan terhadap produk atau program serta media informasi berupa website resmi yang dimiliki pemerintah selain media sosial lainnya. DPRD Kabupaten Paser tentunya juga melakukan sosialisasi dalam mengupayakan berjalannya penyebaran informasi dan pengenalan media website kepada masyarakat. Bentuk sosialisasi yang dilakukan DPRD Kabupaten Paser adalah sosialisasi secara tidak langsung kepada masyarakat menggunakan media sosial lain DPRD. Berikut pernyataan informan tentang sosialisasi, bahwa:

“Kami juga telah memberitahukan tentang keberadaan website kami kepada masyarakat melalui baliho-baliho dan spanduk selalu kami selipkan alamat website kami di bagian bawah baliho atau spanduk yang kami buat dengan harapan

masyarakat yang lewat melihat akan mengetahui, begitu juga pada media sosial seperti YouTube, Facebook dan Instagram kami disetiap kegiatan selalu kami cantumkan link website kami guna untuk mempromosikan website kami agar lebih di kenal masyarakat...”

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa DPRD Kabupaten Paser juga berkomitmen untuk mensosialisasikan website mereka kepada masyarakat melalui platform medial sosial youtube, facebook, dan instagram serta pada baliho dan spanduk yang dipasang yang mencantumkan alamat website resmi dari DPRD Kabupaten paser. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui bahwa DPRD memiliki website tersebut yang berguna untuk media komunikasi antara pemerintah daerah kepada masyarakat sekitar.

Bentuk sosialisasi yang dilakukan DPRD Kabupaten Paser adalah sosialisasi secara tidak langsung kepada masyarakat, tidak seperti sosialisasi pada umumnya yang dilakukan secara langsung dengan mengumpulkan masyarakat disuatu tempat dan memberikan penjelasan langsung. Namun pada pelaksanaannya, terdapat pula beberapa kendala yang disampaikan informan. Hal tersebut di ungkapkan informan dalam wawancara sebagai berikut:

“Penerapan website ini terkendala pada masyarakat yang kurang partisipasi dan antusias dalam menyambut website ini sebagai media berkomunikasi meski hanya berupa memberikan informasi seputar kegiatan DPRD dan berita atau informasi terkini terkait sekitar...”

Informan mengungkapkan kendala yang dihadapi pada berjalannya website adalah partisipasi masyarakat sekitar yang kurang antusias atau tertarik untuk menggunakan website tersebut sebagai media informasi dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap website tersebut menjadi kendala fungsi website DPRD Kabupaten Paser sehingga

belum berjalan secara optimal.

b.) Mekanisme Alur Kerja dan Infrastruktur Penerapan Media Website DPRD

Mekanisme alur kerja pelaksanaan website dibuat berdasarkan aturan dan tujuan penerapan e-government DPRD Kabupaten Paser. Dengan begitu, berjalannya penerapan e-government dalam pengelolaan media website yang baik akan menghasilkan kinerja pemerintahan yang lebih optimal. DPRD Paser melakukan penerapan e-Government ini dalam bentuk website yang dikemas sebagai media informasi dan komunikasi kepada masyarakat terkait kegiatan yang dilakukan DPRD Paser sebagai salah satu bentuk dari transparansi kerja.

Dalam penerapannya, website ini berisi konten-konten yang berbentuk informasi yang terdiri dari berita, pengumuman, kegiatan kerja anggota, serta juga menjadi sebuah informasi diskusi kepada masyarakat terkait berita politik wilayah Kabupaten Paser. Adapun informasi yang didapatkan dari hasil percakapan dengan informan terkait penerapan website yang dikutip sebagai berikut:

“Dalam penerapannya, website ini dibuat untuk mengenalkan anggota dewan, pembagian AKD, Komisi, susunan organisasi, program kerja, hasil atau produk DPRD berupa PERDA yang disinkronkan dengan aplikasi PETA BAPADAH dan dihubungkan juga dengan aplikasi dari Kementerian Hukum dan HAM yaitu JDIH, dan juga berita terkini.”

Pernyataan langsung yang diberikan oleh informan menjelaskan bahwa tujuan awal website ini dibuat adalah untuk mempromosikan atau mengenalkan anggota dewan, visi dan misi organisasi, program-program kerja anggota, produk DPRD yang berhubungan dengan aplikasi kementerian dan berita terkini yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Paser.

Secara infrastruktur, dalam mengelola media sosial berupa website DPRD Kabupaten

Paser memiliki staf admin yang bertugas untuk mengoperasikan website menggunakan PC dan Laptop dalam menyebarkan informasi dan berita terbaru. DPRD Kabupaten Paser juga melakukan pertukaran data sebagai sebuah konsep basis data yang dilakukan untuk menghubungkan, membuat link atau jaringan informasi yang saling terhubung antara website DPRD Kabupaten Paser dengan website pemerintah daerah PETA BAPADAH dan juga dengan website Kementerian Hukum dan HAM yaitu JDIH.

Terkait pengelolaan website, informan menyampaikan sebagai berikut:

“Penerapan website ini sudah berjalan aktif sejak 2019 dan setiap ada perubahan akan selalu di perbaharui langsung oleh admin website. Semisal ada tiga atau empat kegiatan di kantor maka langsung saat itu juga di update kedalam website oleh admin...”

Berdasarkan pernyataan di atas diketahui bahwa, DPRD Kabupaten Paser selaku pengelola website telah menerapkan penyebaran informasi kegiatan dan berita website ini secara up to date atau terbaharukan. Informasi-informasi yang telah diupload dan dituangkan dalam website telah berdasarkan kegiatan dan berita terkini DPRD. Berita ini di kelola langsung oleh admin website yang bekerja dikantor DPRD untuk selalu memberitahukan seluruh kegiatan mereka serta berita dan informasi terbaru yang ada di wilayah Paser sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan komunikasi digital kepada masyarakat.

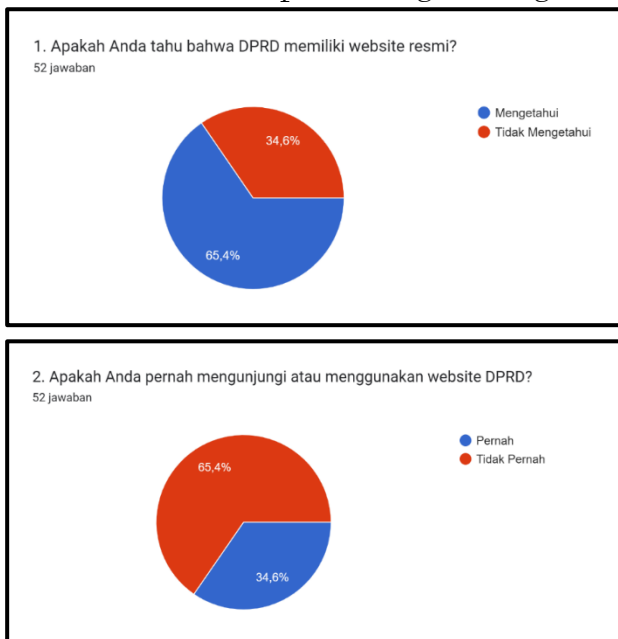
Terdapat pula pernyataan lain dari Informan yang menyatakan bahwa:

“Selain itu kami juga memiliki media lain selain website untuk memberitakan dan menginformasikan kepada masyarakat seperti facebook dan instagram, yang dimana masyarakat lebih aktif pada dua media sosial tersebut daripada website...”

Dari pernyataan tersebut, DPRD Kabupaten Paser juga memiliki alternatif lain dalam

menginformasikan berita dan kegiatan terkini DPRD untuk berkomunikasi kepada masyarakat melalui platform media sosial lain seperti facebook dan instagram. Dalam hal ini, masyarakat lebih aktif dan sering mengakses sosial media tersebut dibandingkan membuka berita pada media website. Informasi yang diberikan pada media sosial facebook dan instagram sama halnya dengan informasi yang diberikan pada website DPRD.

Berdasarkan data yang berasal dari hasil kuesioner masyarakat terkait penyebaran informasi terkini pada website DPRD Kabupaten Paser, data berbentuk diagram lingkaran yang telah diperoleh menunjukkan bahwa masyarakat belum mengetahui informasi terkini dari adanya website DPRD tersebut. Sebanyak 52 responden yang terkumpul dan telah mengisi kuesioner mengenai pengetahuan masyarakat terhadap *website* DPRD Kabupaten Paser. Berikut merupakan diagram lingkaran



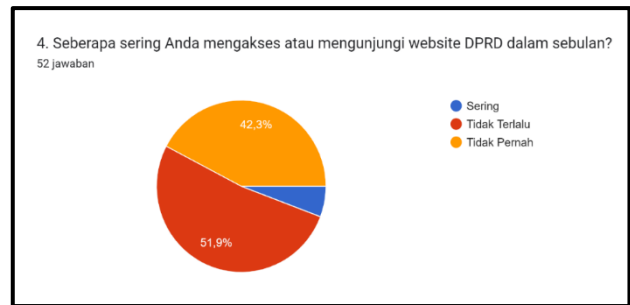
hasil kuesioner kepada masyarakat mengenai *website* DPRD.

Gambar 1. Kuesioner Pengetahuan Masyarakat

Tentang Website DPRD Kabupaten Paser
Diagram lingkaran di atas menunjukkan tingkat pengetahuan responden selaku masyarakat mengenai adanya website DPRD Kabupaten Paser. Pada pertanyaan nomor satu, jumlah persentase masyarakat yang mengetahui adanya website sebesar 65,4% atau sebanyak 34 responden yang menjawab mengetahui dan

sebesar 34,6% atau sebanyak 18 responden yang menjawab tidak mengetahui. Namun pada pertanyaan nomor dua, persentase kunjungan masyarakat terkait website sebanyak 65,4% atau 34 responden tidak pernah mengakses website dan 34,6% atau sebanyak 18 responden yang pernah mengakses website DPRD.

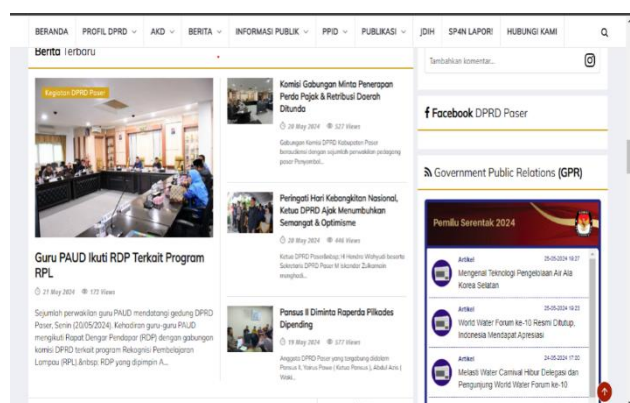
Adapun untuk mengetahui penggunaan



website oleh masyarakat, juga tertuang pada diagram dibawah ini.

Gambar 2. Kuesioner Pengetahuan Masyarakat

Tentang Website DPRD Kabupaten Paser
Pada data diagram lingkaran di atas, bahwa sebanyak 51,9% atau 27 responden menjawab tidak terlalu dan sebanyak 42,3% atau 22 responden menjawab tidak pernah serta persentase 5,8% atau sebanyak tiga responden menjawab sering. Dapat dikatakan bahwa responden selaku masyarakat Kabupaten Paser tidak sering menggunakan atau mengunjungi website DPRD dalam kurun waktu sebulan. Hal tersebut masih menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan DPRD selaku pemerintah dalam memberikan pelayanan informasi digital serta komunikasi dengan masyarakat melalui media website. Berikut gambaran beranda utama dari website DPRD Kabupaten Paser.



Gambar 3. Website DPRD Kabupaten Paser

Perilaku Masyarakat sebagai Penerima Informasi Media Website DPRD

Kontribusi masyarakat sebagai pelaku pendukung berjalannya sistem pemerintahan diketahui sangat penting. Hal ini dikarenakan masyarakat diharapkan sebagai pengguna sosial dan sebagai penerima informasi pemerintahan menunjukkan adanya bentuk komunikasi yang berjalan dengan baik antara pemerintah dan masyarakat.

Perilaku masyarakat dalam suatu daerah atau tempat tentu saja memiliki keberagaman dan perbedaan dari pola penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari hingga pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya penerapan teknologi komunikasi media sosial pada masyarakat wilayah Kabupaten Paser dalam kehidupan sehari-hari terjadi pada umumnya yaitu digunakan sebagai media komunikasi dengan kerabat, teman, orang jauh maupun orang sekitar; selain itu masyarakat menggunakannya untuk mencari sumber informasi terkini yang berasal dari banyak sumber media sosial; ataupun hanya sekedar hiburan untuk mengisi waktu luang saja.

Media website pada DPRD Kabupaten Paser dihadirkan pemerintah agar masyarakat bisa mengetahui apa saja kegiatan dan tugas yang telah dilakukan pemerintah daerah dan produk hukum apa saja yang telah dihasilkan. Hal ini juga sejalan dengan tujuan website DPRD Kabupaten Paser tentang keterbukaan dan keterjangkauan informasi yang diberikan. Berdasarkan data yang diperoleh, masyarakat Kabupaten Paser sebagai pengunjung website cenderung lebih melihat kearah fenomena yang sedang ramai (berita, pengumuman, dll) daripada berita terkait politik seperti kegiatan kerja para anggota dewan dll.

Dalam wawancara terkait partisipasi dan pengetahuan tentang website, informan

mengatakan sebagai berikut:

“Website ini mereka kurang tahu, karena tidak ada informasi terkait adanya website tersebut dan juga saya pakai handphone hanya untuk memberikan kabar dengan keluarga saja. Selain itu, beberapa juga tidak terlalu mengerti cara menggunakan handphone”

Selain itu, informan lain mengatakan bahwa:

“Website ini kadang mereka buka untuk mengetahui berita dan informasi terbaru dan kegiatan yang telah dilakukan. Dan juga saya biasanya lebih sering melihat kegiatan DPRD lewat media sosial instagram ketimbang di website.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, informan menjelaskan bahwa sebagian masyarakat masih belum mengetahui mengenai adanya website DPRD untuk Kabupaten Paser sebagai media informasi dan komunikasi. Selain itu beberapa masyarakat menggunakan teknologi handphone hanya untuk berkabar dengan keluarga dan ada pula yang tidak terlalu mengerti penggunaannya. Adapun beberapa masyarakat yang mengetahui website tersebut dan menggunakannya sebagai media informasi. Selain website, masyarakat lebih banyak menggunakan media sosial berupa instagram untuk mengetahui informasi terbaru terkait kegiatan DPRD Kabupaten Paser.

Kurangnya partisipasi masyarakat juga dapat dilihat dari statistik pengunjung yang ada pada website. Pengunjung website DPRD Kabupaten Paser setiap harinya tidak melebihi dari 20 orang dengan total kunjungan saat data diperoleh berada di angka 58.000+ kunjungan website. Dari angka tersebut jika di lihat dan dihitung dari total penduduk paser sebesar ±290.000 jiwa, total pengunjung hanya sekitar 20% masyarakat yang mengetahui website tersebut sebagai media informasi. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa hanya 20% dari 100% penduduk paser yang mengetahui adanya website tersebut dan menjadikan website tersebut sebagai media informasi politik.

Berikut data statistik kunjungan website DPRD



Kabupaten Paser.

Gambar 4. Statistik Pengunjung Website DPRD Kabupaten Paser

Berbagai hal yang menjadi pemicu kurangnya partisipasi masyarakat diantaranya adalah penyebaran informasi yang kurang lengkap atau menarik, budaya masyarakat, serta kurangnya sosialisasi oleh pemerintah. Hal ini terlihat dari kurangnya pemahaman serta antusias masyarakat sebagai pengunjung website serta terkait pentingnya website sebagai media komunikasi.

Keikutsertaan masyarakat dalam penerapan website DPRD Kabupaten Paser masih belum berjalan sesuai yang diharapkan. Masyarakat lebih sering menggunakan media sosial selain website untuk mencari informasi. Berdasarkan data yang telah diperoleh, masyarakat yang terbiasa menggunakan handphone lebih sering mengakses media sosial untuk berkomunikasi dengan kerabat atau hanya sekedar mencari hiburan, sedikit diantaranya masih ada yang belum menggunakan media sosial atau mengetahui adanya media website DPRD Kabupaten Paser. Beberapa masyarakat yang sudah mengetahui adanya website DPRD terdapat diantaranya mencari berbagai berita terkini dan informasi terkait politik, namun informasi yang diberikan dirasa belum cukup lengkap dan menarik penyampaiannya kepada masyarakat. Oleh karena itu masih banyak masyarakat yang belum tertarik untuk mengunjungi website tersebut.

Hal ini menjadi kendala yang sedang dihadapi dalam penerapan e-government pada pemerintah Kabupaten Paser. Masyarakat

sebagai tujuan atau target dari website belum dapat menerima informasi yang disampaikan dengan baik. Masyarakat cenderung tertarik kepada berita atau fenomena yang diluar dari topik politik seperti kegiatan DPRD berupa rapat paripurna DPRD, kunjungan anggota ke dalam pelosok, dan hasil atau produk jadi DPRD seperti kebijakan atau undang-undang.

Selain kurangnya partisipasi masyarakat, terdapat beberapa kendala yang juga dirasakan oleh pihak DPRD sebagai pengelola. Kendala yang dialami dalam penerapan tersebut terkait tampilan format website yang menurut mereka kurang menarik, kendala tersebut tidak dapat di atasi karena format tampilan dari website tersebut sudah merupakan format yang diberikan KOMINFO kepada mereka tanpa bisa dirubah. Website yang dioperasikan oleh DPRD Kabupaten Paser sebagai pemilik website hanya dapat meng-update berita terbaru kedalam website. Permasalahan yang dihadapi DPRD Kabupaten Paser ini tentu saja menjadi hal yang sangat diperhatikan dan perlu dibenahi agar output dari dihidirkannya website tersebut dapat berjalan dengan baik serta sesuai dengan sasaran dan tujuan e-government.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan website DPRD Kabupaten Paser sebagai media informasi dan komunikasi pemerintahan telah berjalan cukup baik, meskipun masih menghadapi sejumlah kendala. Dari aspek pengelolaan, DPRD konsisten memperbarui informasi kegiatan, rapat, serta kebijakan terbaru melalui website sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan e-government. Selain itu, DPRD juga memanfaatkan media sosial lain seperti YouTube, Instagram, dan Facebook sebagai saluran alternatif dalam menjangkau masyarakat.

Namun demikian, efektivitas website masih terbatas. Faktor utama adalah tampilan

website yang kurang menarik dan tidak dapat dimodifikasi karena mengikuti format baku dari Kementerian Kominfo. Kendala lain adalah rendahnya minat serta literasi digital masyarakat, yang lebih terbiasa menggunakan media sosial populer dibanding mengakses website DPRD. Fitur interaksi langsung, seperti kolom komentar, juga tidak tersedia di website, sehingga komunikasi dua arah antara DPRD dan masyarakat kurang optimal.

REFERENSI

Journal:

- Anshori, S. (2020). "Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial Budaya" Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Sebagai Media Pembelajaran. *Jurnal Ilmu Pendidikan PKN Dan Sosial Budaya*, 4(1), 1–13.
- Apriandi, I. (2017). Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun Tahun 2002 Tentang Syariat Islam di Kota Langsa. Implementasi Kebijakan; Sosialisasi; Kepatuhan Masyarakat, 2–25.
- Cangara H., 2012. Pengantar Ilmu Komunikasi. Ed. 2, Cetakan 13. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Harahap, N. 2020. Penelitian Kualitatif. Medan, Wal Ashri Publishing.
- Indrajit R, E. 2002. Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta, Andi.
- Indrajit R, E., Zainuddin, A., Rudianto, D. 2005. e-Government In Action Ragam Kasus Implementasi Sukses Di Berbagai Belahan Dunia. Yogyakarta, Andi.
- Jaya, S. (2013). Implementasi dan Perkembangan E-Government di Indonesia. *Jurnal Informatika Multimedia*, 2(1), 1–16.
- Noveriyanto, B., Nisa, L. C., Bahtiar, A. S., Sahri, S., & Irwansyah, I. (2018). E-Government Sebagai Layanan Komunikasi Pemerintah Kota Surabaya (Studi Kematangan e-government Sebagai Layanan Komunikasi Government To Government, Government To Citizen, Government To Business). *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 11(1), 1–17.
- Taufik, M., Irawan, B., Paisal, A. (2021). Multi-Stakeholders Governance In Social Science Discipline: A Systematic Literatur Review
- Parsaorantua, P. humisar, Pasoreh, Y., & Rondonuwu, sintje A. (2017). Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Studi Tentang Web E-Government di Kominfo Kota Manado). *Acta Diurna*, VI(3), 1–14.
- Sedarmayanti. 2018. Komunikasi Pemerintahan. Bandung, PT Refika Aditama.
- Sugiartawan, P., Rustina, I. D. K. R., & Saleh Insani, R. W. (2018). E-Government Media Informasi Alat Kelengkapan Dewan Provinsi Bali dan Media Diskusi Berbasis Website. *Jurnal Sistem Informasi Dan Komputer Terapan Indonesia (JSIKTI)*, 1(2), 1–12.
- Zodia, A. P. (2015). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh) Oleh. Jom FEKON, 2(2), 1–15.
- Internet – organization/corporate author:

- Data Sistem e-Government Indonesia. (2023).
[https://databoks.katadata.co.id/
datapublish/2022/10/05/sistem-
e-government-indonesia-
peringkat-ke-5-di-asia-tenggara](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/05/sistem-e-government-indonesia-peringkat-ke-5-di-asia-tenggara)
- Website DPRD Kabupaten Paser. (2022).
<https://dprd.paserkab.go.id/>
- Website Kabupaten Paser. (2023).
[https://kectanahgrogot.paserkab.
go.id](https://kectanahgrogot.paserkab.go.id)
- Website Peta Bapadah Kabupaten Paser.
(2024).
[https://petabapadah.paserkab.go
.id/](https://petabapadah.paserkab.go.id/)
- Website JDIH Kabupaten Paser. (2024).
<https://jdih.paserkab.go.id/>